

# Konsep Dasar Ilmu Ekonomi Perkotaan

Endriyani W, S.E., M.E.



## PENDAHULUAN

---

Ilmu Ekonomi Perkotaan sebagai sebuah cabang ilmu baru mulai dikembangkan sekitar tahun 1950. Tetapi upaya para ahli ekonomi untuk memperdalam dan menelaah masalah-masalah perkotaan sudah lama dilakukan. Masalah-masalah perkotaan yang ada seperti, ketidaklayakan pemukiman, kemiskinan, kemacetan yang kian hari kian parah, tingkat kriminalitas yang tinggi, polusi dan lainnya, menuntut para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memikirkan dan mencari solusi pemecahannya, tidak ketinggalan dengan para ahli ekonomi. Faktor-faktor seperti, nilai sewa lahan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, harga perumahan, transportasi, lalu lintas transportasi, rangkaian kebijakan pemerintah, perpajakan dan keuangan pemerintah daerah menimbulkan dampak pada lingkungan di antaranya seperti kemacetan, perumahan kumuh, dan eksternalitas yang menimbulkan polusi alam. Lebih jauh lagi faktor-faktor tersebut akan menimbulkan masalah kemiskinan, kriminalitas, kesehatan, pendidikan di perkotaan (Prof. Sukanto Reksohadiprodjo, Ekonomi Perkotaan).

Ilmu ekonomi perkotaan ini pada awalnya muncul disebabkan tingkat kemacetan yang terjadi secara luar biasa di Amerika, oleh karena itu, di negara inilah ekonomi perkotaan mulai berkembang (Nining I Soesilo, Ekonomi Kota dan Perkotaan). Kemacetan (*segregation*) muncul sebagai konsekuensi dari tata guna lahan di perkotaan. Oleh karena itu, pada dasarnya ilmu ekonomi perkotaan di dalam analisisnya tidak akan terlepas dari tata penggunaan lahan (*land use*) dan melibatkan faktor ruang (*spatial*) di dalam analisisnya. Selain kemacetan yang menjadi stimulus lahirnya ekonomi perkotaan, masih banyak masalah-masalah lain yang muncul di perkotaan seiring dengan semakin berkembangnya sebuah kota.

Seperti halnya dua sisi mata uang, perkembangan kota tidak melulu menimbulkan masalah-masalah yang kita kenali saat ini. Karena kegiatan yang berada di kotalah standar kehidupan penduduk meningkat. Di kota kegiatan produksi dan perdagangan tumbuh dengan pesat dan dari kegiatan produksi ini kota dapat menyediakan beragam barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Ada banyak penyebab berkembangnya suatu kota, yang pada awalnya dipicu oleh tingginya arus migrasi penduduk yang menyebabkan tingginya angka urbanisasi. Bagi para migran, ketertarikan mereka untuk pindah ke kota disebabkan adanya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan kerja dengan upah yang lebih baik di dibandingkan di daerah pedesaan yang mana kesempatan kerja semakin terbatas dengan tingkat upah yang lebih rendah. Fenomena ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Todaro (1976) yang menjelaskan bahwa perpindahan penduduk terjadi karena tingginya tingkat upah yang mungkin didapatkan di daerah tujuan. Selain itu ketertarikan para migran untuk masuk ke wilayah perkotaan juga disebabkan adanya fasilitas-fasilitas pelayanan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh penduduk di wilayah perkotaan.

Jumlah penduduk yang berdomisili di perkotaan terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Demikian pula yang terpantau di Indonesia. Menurut data SUPAS tahun 2000 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2000 tercatat jumlah penduduk yang berdomisili di kota-kota di Indonesia adalah sebanyak 42% dari total jumlah penduduk, sedangkan sepuluh tahun sebelumnya (1990) sebanyak 30,9% lebih jauh lagi pada tahun 1980 sebanyak 22,3%. Pertumbuhan kota pada periode tahun 1990-2000 lebih pesat dibandingkan pertumbuhan kota pada tahun 1980-1990.

Oleh karena itu, munculnya ilmu ekonomi perkotaan adalah untuk merespons fenomena yang terjadi perkotaan terutama ditinjau dari sisi ekonomi. Perkembangan kota yang kian pesat dewasa ini dengan segala permasalahan yang timbul, menyebabkan peran ilmu ekonomi perkotaan makin diperlukan. Tentu permasalahan yang terdapat di perkotaan tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan pendekatan ilmu ekonomi, disebabkan oleh sifat hakiki kota yang kompleks. Ilmu ekonomi perkotaan akan bersama-sama dengan berbagai disiplin ilmu lainnya seperti, ilmu sosial, politik, budaya, administrasi, psikologi, demografi dan lain-lain, secara komprehensif menelaah dan mencari akar masalah perkotaan untuk mendapatkan alternatif solusi yang tepat.

Tabel 1.1.  
Persentase Penduduk Daerah Perkotaan, 1980-2000

Provinsi	Persentase Penduduk Perkotaan		
	1980	1990	2000
NAD	8,9	10,8	23,6
Sumatra Utara	25,5	35,5	42,4
Sumatra Barat	12,7	20,2	29,0
Riau	27,2	31,7	43,7
Jambi	12,7	21,4	28,3
Sumatra Selatan	27,4	29,3	34,4
Bengkulu	9,4	20,4	29,4
Lampung	12,5	12,4	21,0
Kep. Bangka Belitung	-	-	43,0
DKI Jakarta	93,7	100,0	100,0
Jawa Barat	21,0	34,5	50,3
Jawa Tengah	18,7	27,0	40,4
D.I. Yogyakarta	22,1	44,4	57,7
Jawa Timur	19,6	27,5	40,9
Banten	-	-	52,2
Bali	14,7	26,4	49,8
Lampung	14,1	17,1	34,8
Kep. Bangka Belitung	7,5	11,4	15,9
DKI Jakarta	16,8	20,0	25,1
Jawa Barat	10,3	17,6	27,5
Jawa Tengah	21,4	27,1	36,3
D.I. Yogyakarta	40,0	48,8	57,6
Jawa Timur	16,8	22,8	37,0
Banten	9,0	16,4	19,7
Bali	18,1	24,5	29,4
Nusa Tenggara Barat	9,4	17,0	20,8
Nusa Tenggara Timur	-	-	25,5
Kalimantan Barat	10,9	19,1	25,9
Kalimantan Tengah			29,5
Kalimantan Selatan	21,4	24,1	22,2
Kalimantan Timur	14,1	17,1	34,8
Sulawesi Utara	7,5	11,4	15,9
Sulawesi Tengah	16,8	20,0	25,1
Sulawesi Selatan	10,3	17,6	27,5
Sulawesi Tenggara	21,4	27,1	36,3
Gorontalo	40,0	48,8	57,6
Maluku	16,8	22,8	37,0
Maluku Utara	9,0	16,4	19,7
Papua	18,1	24,5	29,4
INDONESIA	22,3	30,9	42,0

Sumber : BPS, Sensus Penduduk tahun 2000<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Menurut survei BPS, meningkatnya jumlah penduduk di daerah perkotaan mencerminkan adanya migrasi selain dikarenakan adanya perubahan status dari pedesaan menjadi perkotaan.

Berkaitan dengan penjabaran yang telah diuraikan terdahulu, maka sebagai sebuah pendahuluan akan dibahas mengenai: (1) Konsep ekonomi kota dan perkotaan serta cakupan dari ekonomi perkotaan. Esensi dari ilmu ekonomi perkotaan akan dikupas terlebih dahulu sebelum kita melangkah pada materi-materi yang lebih jauh, (2) Definisi perkotaan (*urban area*). Hal ini berkaitan erat dengan beragamnya definisi akan perkotaan yang dapat dilihat dari berbagai disiplin keilmuan, dan (3) Masalah-masalah perkotaan secara mikro dan makro.

Setelah mempelajari dan memahami isi dari modul satu ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Pengertian ekonomi perkotaan dan ruang lingkup ekonomi perkotaan.
2. Konsep Kota dan perkotaan dipandang dari sisi ilmu ekonomi.
3. Teori, isu dan masalah-masalah dalam ekonomi perkotaan baik mikro maupun makro.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Pengertian dari Ekonomi Perkotaan dan Cakupan Ekonomi Perkotaan

### A. LATAR BELAKANG DAN PERAN EKONOMI PERKOTAAN

Sebagai sebuah cabang ilmu ekonomi yang baru, ekonomi perkotaan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menekankan pada analisis ekonomi di wilayah perkotaan. Dilatarbelakangi dengan munculnya masalah-masalah perkotaan pada pertengahan abad 20 atau tepatnya pada akhir tahun 1950 seperti kemacetan, kawasan kumuh, kemiskinan, semakin meningkatnya angka kriminalitas, maka cabang ilmu ekonomi ini mulai dikembangkan. Sejak saat itu, ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu berusaha keras untuk memahami fenomena yang terjadi di perkotaan termasuk para ekonom. Hal itulah yang menyebabkan lahirnya cabang ilmu ekonomi perkotaan.

Teori modern tata guna lahan, yang pada dasarnya adalah inti dari ekonomi perkotaan, dapat dikatakan sebagai kebangkitan dari teori tata guna lahan (*land use*) pertanian yang digagas oleh Von Thunen (1826). Lebih dari satu abad teori yang dikembangkan oleh Von Thunen tidak mendapat perhatian dari para ekonom. Pada saat kota tumbuh dengan sangat cepat, melebihi kecepatan perkembangan dari konsep tradisional rencana kota (*urban design*) diiringi dengan munculnya berbagai permasalahan di wilayah perkotaan, para ilmuwan menyadari perlunya suatu pemecahan secara komprehensif. Secara khusus para ekonom dan pakar teori lokasi, mengembangkan teori tata guna lahan pertanian dari Von Thunen. Para penggagas yaitu Isard (1956), Beckmann (1957), Wingo (1961) dan Alonso (1962) berhasil melakukan generalisasi terhadap teori kurva biaya sewa (*bid rent curve*) milik Thunen ke dalam konteks perkotaan. Sejak saat itu, ilmu ekonomi perkotaan mengalami kemajuan yang sangat pesat secara teoritis dan empirik. Beberapa pakar yang kemudian mengembangkan cabang ilmu ini di antaranya adalah Muth (1969), Mills (1972), Henderson (1977) (dalam Fujita, 1989).

Pola tata guna lahan dan struktur kota yang saat ini ada tidak lepas dari aktivitas setiap individu di masa lalu. Apabila dalam sistem penggunaan lahan tidak diatur secara seksama, maka kemungkinan besar akan menimbulkan masalah yang tidak kecil di kemudian hari.

Oleh karena itu, peranan pemerintah sebagai regulator sangat berperan di dalam pengaturan tata guna lahan. Di samping itu, telah banyak studi yang mengungkapkan peranan pemerintah di dalam struktur ruang di berbagai wilayah perkotaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka ekonomi perkotaan memiliki peranan sebagai berikut:

1. Peran positif (*Positif Theory*), adalah menyediakan penjelasan secara teoretis dan empiris. Dalam hal ini ekonomi perkotaan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan bagi regulator untuk menentukan arah kebijakan perencanaan kota.
2. Peran normatif (*Normative Theory*), dalam hal ini ekonomi perkotaan digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur pencapaian dari kebijakan yang telah ditentukan oleh regulator sebelumnya di dalam sistem ekonomi perkotaan. Aspek normatif ini juga sering disebut dengan ekonomi kesejahteraan (*welfare economic*). Evaluasi dan pencapaian dari suatu sistem ekonomi perkotaan mengacu pada efisiensi dan pemerataan.

## **B. APA YANG DIMAKSUD DENGAN EKONOMI PERKOTAAN**

Ilmu ekonomi perkotaan adalah studi mengenai pemilihan lokasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di perkotaan yaitu perusahaan (*firm*) dan rumah tangga (*household*) (Sullivan, *Urban Economic*). Di dalam ekonomi perkotaan aspek ruang (*spatial*) menjadi faktor penting di dalam analisisnya.

Dapat dikatakan bawah ekonomi perkotaan satu langkah lebih maju dibandingkan ilmu ekonomi lainnya, karena pada cabang ilmu ekonomi perkotaan perusahaan dan rumah tangga tidak selalu melakukan kegiatan ekonomi hanya pada satu titik melainkan bisa di mana saja, sedangkan pada cabang ilmu ekonomi yang lain asumsi yang digunakan adalah seluruh kegiatan produksi dan konsumsi berada pada satu titik tertentu. Asumsi ini tidak realistis dan sulit untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi sesungguhnya, karena baik perusahaan maupun rumah tangga dapat melakukan kegiatan ekonomi di mana saja dengan pertimbangan maksimalisasi keuntungan bagi perusahaan dan maksimalisasi manfaat bagi rumah tangga. Di dalam ekonomi perkotaan pilihan perusahaan akan lokasi untuk mendirikan pabrik, kantor dan tempat perdagangan sebagaimana halnya pilihan rumah tangga untuk tinggal dan bekerja menjadi faktor yang diperhitungkan di dalam analisis.

Pemilihan lokasi yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kota, permasalahan-permasalahan yang ada di kota pun akan mempengaruhi penentuan lokasi yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Pilihan akan lokasi dan permasalahan kota memiliki hubungan timbal balik. Masalah-masalah perkotaan seperti kemiskinan, kemacetan, perumahan, kriminalitas dan polusi yang terjalin di dalam penentuan lokasi yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan.

Di dalam analisisnya mengenai lokasi dalam ilmu ekonomi, terdapat tiga pendekatan yaitu (Needham, mengutip Nining I Soesilo, Ekonomi Kota dan Perkotaan):

### **1. Pendekatan Ekonomi Lokasi**

Di dalam pendekatan ekonomi lokasi ini ekonomi kota dianggap sebagai bagian ruang dari ekonomi nasional. Hubungan antar kota dan negara dianggap sebagai ekonomi antar ruang, maka teori lokasi digunakan untuk melihat hubungan sebab – akibat antara kota dan negara. Di dalam teori lokasi, jarak digunakan sebagai salah satu variabel. Perpindahan antar ruang membutuhkan waktu dan biaya, sehingga di dalam teori ekonomi jarak diterjemahkan sebagai biaya. Asumsi yang digunakan di dalam pendekatan ekonomi lokasi ini adalah; (1) Setiap orang bertindak secara rasional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (2) Keseimbangan umum tercapai, (3) Campur tangan pemerintah dianggap memperburuk keadaan.

Dalam pendekatan ini, pembahasan mengenai lokasi ekonomi dibagi menjadi dua bagian, yang pertama teori lokasi itu sendiri dan yang kedua teori lokasi digunakan secara bersama-sama dengan ilmu ekonomi mikro. Berdasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh teori lokasi, secara empiris hasilnya masih diragukan, sedangkan untuk teori lokasi dengan pendekatan kedua (penggunaannya bersama-sama dengan ekonomi mikro) masih sulit untuk dilakukan, mengingat bahwa ilmu itu baru dikembangkan pada tahun 1973 .

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa prinsip-prinsip dari pendekatan ekonomi lokasi adalah:

- a. Kota merupakan bagian dari ekonomi negara.
- b. Penggunaan teori lokasi dipadukan dengan teori mikro ekonomi.
- c. Kota dan Negara berhubungan antar ruang.
- d. Intervensi pemerintah dapat memperburuk keadaan.

## 2. Pendekatan Kota Negara

Pada pendekatan ini kota dianggap sebagaimana negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain. Pada pendekatan ini kota layaknya sebuah negara yang memerlukan keseimbangan ekspor dan impor, dan banyak menggunakan teori makro di dalam analisisnya. Asumsi yang digunakan di dalam pendekatan ini adalah; (1) Kota perlu menjaga keseimbangan ekspor-impor, (2) Campur tangan pemerintah dipercaya dapat mengatasi perekonomian yang tidak stabil.

Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk membuat persamaan keseimbangan ekspor – impor. Hal ini sangat membantu pakar teori untuk membuat teori yang komprehensif mengenai ekonomi perkotaan. Salah satu contoh yang menggunakan teori kota sebagai sebuah negara adalah teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini merupakan salah satu dasar pemikiran yang paling utama pada ilmu ekonomi yang pada awalnya banyak digunakan sebagai landasan teori perdagangan internasional. Adapun prinsip-prinsip dari kota sebagai negara ini adalah:

- a. Kota dianggap sebagaimana negara.
- b. Diperlukan keseimbangan ekspor – impor untuk jangka pendek dan panjang.
- c. Menggunakan pendekatan ekonomi makro.
- d. Intervensi pemerintah diperlukan.

## 3. Pendekatan Keseimbangan Sebagian

Pada pendekatan ini kota diasumsikan sebagai satu kesatuan yang sangat terbuka yang tidak memiliki hambatan apapun di perbatasan. Pada pendekatan ini diperlukan sejumlah asumsi bahwa variabel-variabel tertentu yang berada di luar kota dianggap konstan. Variabel-variabel yang dianggap konstan disesuaikan dengan indikasi yang akan diperkirakan di suatu kota. Hal ini dilakukan agar ekonomi makro dapat diterapkan. Sangat sulit untuk menerapkan teori makro pada pendekatan ini disebabkan kurang adanya hubungan arus masuk dan keluar dari barang dan jasa, sekali lagi mengingat bahwa asumsi dari pendekatan ini adalah tidak adanya hambatan di perbatasan bagi satu kota. Hal ini menjadi salah satu kelemahan untuk membuat teori yang komprehensif (Needham, dikutip Nining I. Soesilo). Prinsip-prinsip dasar dari pendekatan ini adalah:

- a. Kota adalah sebuah satuan ekonomi yang terbuka.



- b. Diasumsikan bahwa variabel-variabel di luar observasi adalah konstan.
- c. Perubahan ekonomi kota tidak mempengaruhi ekonomi nasional.

### **C. CAKUPAN EKONOMI PERKOTAAN**

Studi yang dilakukan di dalam ekonomi perkotaan meliputi makro dan mikro. Ekonomi mikro digunakan untuk mengkaji aktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan dan interaksi keduanya yang memberikan konsekuensi pada pemilihan lokasi kegiatan. Salah satu contohnya adalah nilai sewa lahan, yang merupakan sebuah komoditi tidak bergerak (*immobile*) dan nilainya sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang terjadi di atasnya. Aktivitas di atas lahan tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara rumah tangga dan perusahaan. Contoh lainnya adalah besaran kompensasi yang harus dibayarkan oleh industri atas eksternalitas negatif yang ditimbulkannya. Eksternalitas yang biasanya ditimbulkan oleh kegiatan industri ini yaitu ketika industri menggunakan fasilitas pelayanan (seperti jalan, udara, air) ketika melakukan produksi dan membayar kompensasi yang tidak sesuai sehingga menimbulkan polusi yang merugikan masyarakat umum. Pemerintah yang berperan sebagai regulator perlu menemukan besarnya kompensasi yang seharusnya dibebankan kepada industri sebagai konsekuensi dari penggunaan fasilitas pelayanan. Untuk merumuskan berapa besar kompensasi yang selayaknya ditanggung oleh industri, digunakanlah pendekatan mikro. Contoh-contoh lain yang menggunakan kajian mikro ekonomi adalah perumahan di dalam struktur tata ruang kota, besarnya biaya transportasi dan lain-lain.

Sedangkan studi makro ekonomi banyak digunakan untuk mengukur variabel agregat dari kota. Beberapa contoh variabel kota yang membutuhkan studi makro ekonomi sebagai pendekatannya antara lain adalah tingkat pendapatan kota (PDRB), pendapatan per kapita, nilai pertumbuhan dari kota, kesenjangan pendapat masyarakat, besarnya impor dan ekspor, barang dan jasa, dan sebagainya. Baik studi mikro dan makro digunakan sebagai landasan teoritis dalam ekonomi perkotaan.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan peranan dari ekonomi perkotaan di dalam penentuan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota (*policy maker*)?
- 2) Jelaskan, apa yang dimaksud dengan ekonomi perkotaan?
- 3) Uraikan mengapa lokasi menjadi variabel yang sangat penting di dalam ekonomi perkotaan?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Baca kembali peranan pemerintah sebagai regulator di dalam ruang lingkup perkotaan. Temukan apa yang dapat dilakukan oleh ekonomi perkotaan untuk mendukung peranan pemerintah sebagai penentu kebijakan (*policy making*).
- 2) Baca kembali pendapat Arthur O'Sullivan salah seorang ekonom perkotaan, serta alasan akan sudut pandangannya.
- 3) Apabila Anda kembali membaca petunjuk pada poin 2, Anda akan dengan mudah menjawab soal latihan ini.



## RANGKUMAN

---

1. Ekonomi perkotaan adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang digunakan untuk mengkaji beragam fenomena dan masalah yang ada di wilayah perkotaan. Ekonomi perkotaan sesungguhnya adalah suatu studi mengenai pemilihan lokasi yang dilakukan oleh perusahaan dan rumah tangga sebagai pelaku ekonomi dengan mempertimbangkan faktor ruang di dalam analisisnya.
2. Pemilihan lokasi yang menjadi inti dalam ekonomi perkotaan ini mempertimbangkan pilihan lokasi yang dilakukan oleh perusahaan dan rumah tangga di dalam melakukan kegiatan ekonomi
3. Cakupan dari ekonomi perkotaan meliputi mikro ekonomi dan makro ekonomi. Beberapa contoh kajian yang menggunakan pendekatan mikro ekonomi seperti nilai sewa lahan, biaya transportasi, pemilihan lokasi untuk perumahan dan lokasi bekerja

di dalam struktur tata ruang perkotaan, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan makro digunakan sebagai pendekatan atas beberapa kajian, di antaranya adalah tingkat kemiskinan kota, pajak, pengeluaran pemerintah daerah, dan indikator makro ekonomi kota lainnya.



### TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ekonomi perkotaan bertugas untuk memberikan penjelasan secara teoritis dan empiris atau memberikan hipotesis berdasarkan teori-teori ekonomi. Menurut Anda, pernyataan tersebut menegaskan bahwa ekonomi perkotaan memiliki peran sebagai....
  - A. peran positif
  - B. peran normatif
  - C. peran *welfare economic*
  - D. peran evaluasi
  
- 2) Mengapa lokasi menjadi inti dari ekonomi perkotaan?
  - A. Karena interaksi di antara pelaku ekonomi di wilayah perkotaan berada pada satu titik.
  - B. Karena interaksi antara perusahaan dan rumah tangga memiliki hambatan lokasi di dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.
  - C. Karena interaksi antara perusahaan dan rumah tangga di dalam melakukan aktivitas ekonominya bisa terjadi di mana saja.
  - D. Karena lokasi perusahaan berada di pusat kota sedangkan lokasi rumah tangga berada di daerah satelit (*sub urban area*).
  
- 3) Mengapa ekonomi perkotaan merupakan satu langkah maju dalam perkembangan ilmu ekonomi?
  - A. Karena ekonomi perkotaan menganalisis fenomena dan masalah perkotaan yang baru berkembang sekitar tahun 1950.
  - B. Karena pada ekonomi perkotaan terdapat asumsi bahwa pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi yang tidak berada pada satu titik lagi.
  - C. Karena ekonomi perkotaan merupakan hasil pengembangan dari teori tata guna lahan di daerah pedesaan.
  - D. Karena baik pendekatan makro ekonomi maupun mikro ekonomi digunakan dalam ekonomi perkotaan secara bersama-sama.

- 4) Untuk mengetahui, distribusi penduduk di wilayah perkotaan maka dilakukan suatu analisis ekonomi. Pendekatan ekonomi apakah yang digunakan untuk mengkaji isu di atas?
- Makro ekonomi.
  - Mikro ekonomi.
  - Makro dan mikro ekonomi.
  - Makro atau mikro ekonomi.
- 5) Di dalam pendekatan ekonomi lokasi dalam analisis mengenai lokasi, manakah asumsi yang tidak digunakan?
- Kota adalah sebuah satuan ekonomi yang terbuka
  - Kota dan Negara berhubungan antar ruang
  - Intervensi pemerintah dapat memperburuk keadaan.
  - Keseimbangan ekspor dan impor dari kota.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 2****Definisi Perkotaan (*Urban Area*) pada  
Ekonomi Perkotaan**

Apabila kita bertanya mengenai definisi dari kota, maka jawabannya akan tergantung dari sisi keilmuan apa yang digunakan. Definisi kota menurut sudut pandang ilmu ekonomi akan berbeda dengan definisi kota dari sudut pandang sosiologi. Masing-masing bidang studi memiliki definisinya masing-masing mengenai kota sesuai dengan latar belakang keilmuannya.

Salah satu ciri yang paling mudah dikenali dari kota adalah padatnya penduduk yang berdomisili di lingkup kota tersebut. Di samping memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, wilayah kota juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan administrasi pemerintahan. Kegiatan ekonomi penduduknya sangat beraneka ragam yang lebih didominasi oleh kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa sedangkan kegiatan di sektor pertanian relatif terbatas. Bahkan di kota besar atau kota metropolitan seperti DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makasar dan kota besar lainnya kegiatan ekonomi di sektor primer hampir tidak dapat ditemui.

Ditinjau dari segi ketersediaan fasilitas pelayanan umum, wilayah perkotaan relatif memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan yang lebih, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan di sini adalah kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitasnya seperti aktivitas ekonomi dengan tersedianya sentra-sentra perdagangan, perbankan, hingga asuransi juga aktivitas sosial seperti sekolah sejak *play group* dan Taman Kanak-kanak hingga universitas baik negeri maupun swasta, rumah sakit, tempat-tempat hiburan hingga tersedianya taman kota, dan tersedianya infrastruktur yang relatif lebih memadai seperti jalan raya, angkutan umum, penyediaan air bersih, listrik, telepon, dan lain-lain.

**A. DEFINISI KOTA MENURUT TINGKAT KEPADATAN  
PENDUDUK**

Definisi kota menurut para ahli ekonomi biasanya dihubungkan dengan tingginya jumlah penduduk yang menetap di suatu wilayah atau yang disebut dengan tingkat kepadatan penduduk.

Menurut Sullivan seorang pakar ekonomi perkotaan dalam bukunya yang berjudul *Urban Economic*, yang diartikan sebagai kota adalah suatu area geografis yang terdiri dari sejumlah penduduk dengan jumlah yang besar sedangkan luas dari areanya sendiri relatif terbatas. Dengan kata lain definisi kota menurut Sullivan adalah suatu area geografis dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Mengapa demikian, karena ilmu ekonomi perkotaan didasarkan pada frekuensi interaksi antara para pelaku ekonomi yang berbeda. Pelaku ekonomi yang dimaksud adalah perusahaan (industri) dan rumah tangga, interaksi antara perusahaan dan rumah tangga dimungkinkan terjadi hanya apabila keduanya berada pada satu area yang relatif terbatas (Sullivan, *Urban Economic*). Definisi ini dapat mengakomodasi area kota yang ukurannya beragam, mulai dari kota kecil hingga kota metropolitan.

Selain itu Mills mengatakan dalam hipotesisnya bahwa kota adalah suatu wilayah di mana tingkat populasi penduduknya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang melingkupinya (Richardson, 1978). Walaupun definisi ini masih samar disebabkan adanya persoalan di dalam menentukan ukuran tingkat kepadatan penduduk, definisi “kota” dari Mills ini telah memberikan satu implikasi yang menarik di dalam ilmu ekonomi. Jika lebih banyak jumlah orang yang bekerja atau tinggal di atas sebidang lahan yang luasnya tetap (*given*), maka akan berimplikasi pada tingginya tingkat produktivitas dari lahan tersebut. Dapat juga dijelaskan bahwa kota memiliki rasio input non-tanah/terhadap tanah (*ratio non-land/land*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang melingkupinya. Dengan demikian pendekatan tinggi rendahnya rasio *input non-land/land* atau tinggi rendahnya rasio output – land akan lebih mudah diterapkan untuk menentukan wilayah non-urban dibandingkan dengan pendekatan ukuran tingkat kepadatan penduduk. Mengapa demikian, alasannya adalah:

1. Apa yang melandasi tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan sangat tergantung pada rata-rata kepadatan penduduk akan ekonomi secara keseluruhan.
2. Adanya pemikiran umum bahwa kepadatan penduduk wilayah kota memiliki kecenderungan menurun, sehingga batas-batas akan wilayah kota dapat bergeser. Hal ini dapat terjadi karena (a) Pusat kota sebagai suatu area ditinggalkan oleh penduduknya, (b) Meningkatnya penduduk di pinggir kota (suburban area), kemungkinan disebabkan dengan saatnya dari pembangunan dan rasio dari input yang dipilih oleh

pengembang, (c) Adanya pengaruh variasi dari pusat kota (*center city*) di antara wilayah metropolitan, dan (4) Adanya kesenjangan pengukuran akan tingkat kepadatan penduduk desa di beberapa negara khususnya negara memilih tingkat kepadatan penduduk yang tinggi (*highly urbanized country*).

## B. DEFINISI KOTA MENURUT BATAS ADMINISTRASI

Salah satu pendekatan dari kota adalah berdasarkan batas administrasi sebagai satu kesatuan wilayah politis. Keuntungan dari pendekatan ini adalah banyaknya data-data statistik yang tersedia untuk sebuah kota administrasi, di mana data-data tersebut sangat diperlukan dalam analisis sebuah kota. Kota berdasarkan batasan administrasi ini sesungguhnya merupakan suatu kebijakan dan bagian dari perencanaan.

Untuk Indonesia definisi, kota menurut batas administrasi meliputi: kota (dahulu kotamadya), kabupaten, dan daerah istimewa yang bercirikan urban. Menurut Badan Pusat Statistik, suatu area dikatakan kota apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki kepadatan penduduk minimal 5000 orang/km<sup>2</sup>.
2. Memiliki paling sedikit 8 fasilitas kota.
3. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian kurang dari 25%.

Karena di dalam setiap analisis ekonomi perkotaan menggunakan data yang hampir selalu dihasilkan oleh BPS, maka definisi dan konsep kota menurut BPS perlu untuk diperhatikan sebagai batasan-batasan akan kota.

Tabel 1.2.  
Kepadatan Penduduk di Beberapa Kota Besar di Indonesia

Kota	Persentase Penduduk Perkotaan		
	1995	2000	2005
Indonesia	92.005.069	121.370.218	212.375.287
1. Sumatera Utara	5.360.009	6.328.978	11.688.987
2. Sumatera Barat	1.363.036	3.192.774	4.555.810
3. Riau	1.669.769	2.893.637	4.563.406
4. Jambi	714.316	1.912.900	2.627.216
5. Sumatera Selatan	2.268.875	4.498.770	6.767.645
6. Bengkulu	439.747	1.106.539	2.627.216
7. Lampung	1.490.170	5.614.402	7.104.572
8. Kep. Bangka Belitung	426.982	615.846	1.042.828

Kota	Persentase Penduduk Perkotaan		
	1995	2000	2005
9. Kepulauan Riau	1.010.587	262.424	1.273.011
10. DKI Jakarta	8.839.247	-	8.839.247
11. Jawa Barat	20.051.392	18.835.583	38.886.975
12. Jawa Tengah	12.903.891	18.992.223	31.896.114
13. DI Yogyakarta	1.973.631	1.363.464	3.337.095
14. Jawa Timur	14.726.139	21.331.968	36.058.107
15. Banten	4.752.033	4.256.118	9.008.151
16. Bali	1.712.793	1.665.299	3.378.092
17. Nusa Tenggara Barat	1.471.270	2.698.425	4.169.695
18. Nusa Tenggara Timur	662.114	3.581.068	4.243.182
19. Kalimantan Barat	1.088.369	2.954.448	4.042.817
20. Kalimantan Tengah	553.081	1.359.945	1.913.026
21. Kalimantan Selatan	1.245.481	2.025.932	3.271.413
22. Kalimantan Timur	1.603.799	1.237.075	2.840.874
23. Sulawesi Utara	792.061	1.328.956	2.121.017
24. Sulawesi Tengah	457.562	1.833.407	2.290.969
25. Sulawesi Selatan	2.550.477	5.906.646	8.457.123
26. Sulawesi Tenggara	427.165	1.533.532	1.960.697
26. Gorontalo	239.555	680.460	920.015
27. Maluku	358.806	680.460	1.249.212
28. Maluku Utara	215.989	665.878	881.867
29. Papua	636.723	1.803.115	2.439.838

Sumber : SUPAS Tahun 2000 - BPS

Akan tetapi pendekatan ini pun memiliki kelemahan yaitu batas-batas administrasi yang ditentukan tersebut tidak mempertimbangkan kemungkinan melebarnya batas-batas ekonomi dan fungsi kota yang melebihi dari batas-batas administrasi yang relatif lebih kecil (Richardson, 1978).

### C. PENDEKATAN KOTA MENURUT FUNGSI EKONOMIS AREA

Pendekatan ini dilandasi oleh pemikiran akan standar atau ukuran keterlibatan pasar tenaga kerja di wilayah metropolitan. Ide yang dikembangkan oleh Fox and Kumar (1965) ini menyatakan bahwa pusat kota di rancang sebagai pusat dari pasar tenaga kerja (*labor market*) yang mana merupakan basis dari inti kekuatan tenaga kerja (Richardson, 1978). Fungsi ekonomis area ini akan melibatkan seluruh wilayah di sekitarnya karena arus wilayah pulang dan pergi (*communiting field*) dari tenaga kerja ini lebih banyak menuju ke pusat kota yang berperan sebagai pusat dari pasar tenaga



kerja (fungsi ekonomis area) ketimbang ke pasar tenaga kerja di wilayah-wilayah lainnya.

Ketika pendekatan ini bertitik tolak pada arus pergerakan dari tenaga kerja untuk pergi dan pulang (*commuting*), secara implisit diasumsikan bahwa aktivitas pekerja untuk pergi dan pulang setiap harinya menjadi salah satu isu yang paling penting di dalam konteks hubungan antar-kota (*intra relation*). Tidak diragukan lagi bahwa perkiraan untuk membatasi area dari pasar tenaga kerja ini, mengurangi kewajiban dari analisis perkotaan akan kemungkinan berbedanya lokasi bekerja dengan lokasi di mana para pekerja bermukim. Di sisi lain, konsep dari fungsi ekonomis area dan konsep wilayah pergi dan pulang ini lebih tepat diterapkan untuk menggambarkan simpul-simpul wilayah ketimbang untuk menggambarkan wilayah di dalam perkotaan itu sendiri.

Berbagai macam upaya yang telah diusahakan untuk memberikan makna operasional pada suatu definisi kota pada akhirnya memiliki penekanan pada dua kriteria (Richardson, 1978) yaitu:

1. Batas minimal dari tingkat permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) jasa perkotaan pada jarak tertentu.
2. Batas minimal tingkat kepadatan penduduk (*density*).

## E. FUNGSI EKONOMI KOTA

Dengan adanya ciri-ciri kota yang meliputi jumlah penduduk yang padat, tersedianya fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi perkotaan yang di dominasi dengan kegiatan ekonomi sektor sekunder dan tersier, maka kota juga merupakan pusat pertumbuhan. Kegiatan yang terjadi di perkotaan tidak hanya akan mendorong pertumbuhan di dalam wilayahnya tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan daerah-daerah di sekitarnya dengan interaksi yang terjadi di antaranya melalui kegiatan perdagangan, pendidikan, kesehatan, sistem permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), yang menyebabkan keterkaitan yang erat dengan wilayah-wilayah di sekitar perkotaan. Dengan demikian peranan kota sebagai faktor penggerak pembangunan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, fungsi kota sebagai motor penggerak ekonomi adalah: (Adisasmita, 2006)

1. Spesialisasi, yang akan menyebabkan tingkat ketergantungan di antara bagian-bagian yang berbeda semakin tinggi, kota-kota merupakan

konsentrasi dari berbagai kegiatan yang saling tergantung satu dengan lainnya sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan yang lebih besar.

2. Inovasi. Adanya tingkat aksesibilitas internal dan eksternal yang tinggi serta adanya penghematan-penghematan eksternal yang tersedia di kota, akan mendorong inovasi dan penyebaran pengaruhnya bukan hanya ke dalam lingkup kota akan tetapi juga ke wilayah-wilayah sekitarnya. Masyarakat yang berada lebih dekat dengan pusat kota akan lebih terpengaruh oleh inovasi dan perubahan-perubahan yang terjadi di segala bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Lebih lanjut penyebaran inovasi adalah salah satu unsur yang paing penting dalam pembangunan dan integrasi nasional.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Menurut Anda, faktor apa yang melatarbelakangi digunakannya konsep kepadatan penduduk sebagai definisi dari kota menurut ilmu ekonomi?
- 2) Jelaskan bagaimana konsep kepadatan penduduk dapat menjelaskan produktivitas dari lahan sebagai salah satu input produksi?
- 3) Sebagai motor bagi pertumbuhan wilayah di sekitarnya, kota memiliki beberapa peran. Jelaskan apa saja peranan kota tersebut?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Coba Anda baca, pendapat dari Arthur O'Sullivan mengenai definisi dari kota. O'Sullivan memberikan pertimbangan mengapa definisi kota dihubungkan dengan kepadatan penduduk.
- 2) Kembali Anda teliti lagi pendapat dari Mills akan definisi kota. Karena pandangan dari Mills ini memberikan implikasi pada konsep produktivitas lahan.
- 3) Kembali Anda teliti mengenai fungsi-fungsi kota sebagai pusat pembangunan wilayah-wilayah sekitarnya khususnya pandangan (Adisasmita, 2006).



## RANGKUMAN

---

1. Definisi kota secara ekonomi tidak terlepas dari konsep kepadatan penduduk. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa ekonomi perkotaan didasarkan pada interaksi antara pelaku ekonomi, di mana pelaku-pelaku ekonomi tersebut berada pada satu wilayah yang relatif terbatas. Di samping itu konsep kota atas dasar kepadatan penduduk memberikan implikasi pada produktivitas lahan. Semakin banyak jumlah penduduk yang melakukan aktivitas di atas lahan yang ukurannya tetap (*given*), maka produktivitas lahan akan semakin tinggi. Suatu wilayah di mana lahannya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi merupakan ciri-ciri wilayah kota.
2. Selain itu, kota memiliki interaksi baik ekonomi maupun sosial dengan wilayah-wilayah sekitarnya di samping interaksi yang terjadi di dalam kota itu sendiri. Oleh karena itu, kota juga merupakan motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya. Sebagai motor penggerak pembangunan, kota memiliki fungsi spesialisasi dan inovasi.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dari berbagai upaya untuk dapat memberikan makna operasional kepada wilayah yang disebut dengan kota, ternyata seluruh upaya tersebut mengarah pada dua kriteria. Manakah dari pertanyaan berikut ini yang merupakan kriteria tersebut?
  - A. Batas minimum dari tingkat kepadatan penduduk.
  - B. Batas minimum dari tingkat produktivitas lahan.
  - C. Jarak minimum yang ditempuh oleh tenaga kerja ke pusat kota yang merupakan *market labour*.
  - D. Batas minimum dari tingkat permintaan barang.
- 2) Menurut para ahli ekonomi ukuran apa yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah termasuk dalam kategori kota atau non-kota?
  - A. Banyaknya fasilitas pelayanan yang terdapat di kota.
  - B. Tingkat kepadatan penduduk.
  - C. Beragamnya aktivitas penduduk perkotaan.
  - D. Jumlah penduduk usia produktif.

- 3) Apakah kelemahan dari kota menurut batas administrasi?
  - A. Batasan administrasi yang ditentukan biasanya tidak dapat mempertimbangkan melebarnya perekonomian dan fungsi kota.
  - B. Tidak dapat digunakan untuk kebutuhan analisis kota.
  - C. Sulit untuk mendapatkan data-data indikator makro kota.
  - D. Batas administrasi dianggap terlalu luas
  
- 4) Jalan bebas hambatan yang saat ini semakin masif di bangun untuk menghubungkan kota satu dengan kota/wilayah lainnya, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi baik di dalam kota maupun wilayah yang dihubungkan dengan keberadaan jalan bebas hambatan tersebut. Menurut Anda mengapa hal ini bisa terjadi?
  - A. Karena adanya spesialisasi yang dilakukan oleh kota sehingga interaksi antara kota dengan wilayah di sekitarnya semakin tinggi.
  - B. Karena kota merupakan motor penggerak dari pembangunan di wilayah-wilayah sekitarnya.
  - C. Karena adanya inovasi dari kota sehingga wilayah-wilayah sekitarnya mendapatkan manfaat dan memicu pertumbuhan ekonomi.
  - D. Karena adanya meningkatnya aktivitas ekonomi di kota sehingga permintaan akan barang dan jasa semakin meningkat.
  
- 5) Adanya batasan wilayah kota yang relatif dari ekonomi perkotaan yang ukurannya didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk masih belum mampu untuk membuat batasan yang pasti akan kota. Menurut Anda mengapa hal ini terjadi?
  - A. Karena ukuran tingkat kepadatan penduduk tidak dapat menjelaskan arus pulang-pergi dari para pekerja setiap harinya.
  - B. Karena adanya perbedaan ukuran tingkat kepadatan penduduk antar satu negara dengan negara lain ataupun antar wilayah sehingga ukuran kota menjadi samar.
  - C. Karena tingkat kepadatan penduduk tidak dapat mengukur tingkat produktivitas lahan.
  - D. Karena tingkat kepadatan penduduk lebih banyak digunakan sebagai ukuran demografi.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Masalah-masalah Perkotaan

Adanya migrasi, selain memberikan dampak positif pada kota terutama pada saat kota sedang dalam proses pertumbuhan, juga merupakan sumber munculnya berbagai permasalahan di perkotaan. Tingginya arus migrasi merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat urbanisasi<sup>2</sup> di perkotaan. Tingginya tingkat urbanisasi di perkotaan secara langsung akan menyebabkan kepadatan penduduk yang lebih lanjut menyebabkan timbulnya pemukiman padat di perkotaan dan pada ujungnya menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan. Di samping itu, urbanisasi ini juga dapat memicu tingkat kriminalitas di perkotaan, hal ini terjadi terutama apabila para migran adalah pencari kerja yang *unskilled*. Yang dimaksud dengan *unskilled* adalah para pencari kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang terbatas. *Unskilled labour* ini akan memiliki kesukaran dalam mencari pekerjaan pada sektor formal di perkotaan yang sangat kompetitif. Tidak terserapnya *unskilled labour* menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di perkotaan dan akhirnya meningkatkan kemiskinan di kota. Pada akhirnya karena tidak memiliki pekerjaan dan dalam keadaan miskin, segala macam cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi dibandingkan di wilayah-wilayah lain, sehingga terjadilah perampokan, pencurian, pemerasan, penipuan dan berbagai tindak kejahatan lainnya dalam masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas ini menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan.

Selain menimbulkan ketidaknyamanan terhadap lingkungan karena terbatasnya peluang kerja di sektor formal, *unskilled labour* lebih banyak terserap pada lapangan pekerjaan di sektor non-formal perkotaan. Seperti menjadi pemulung, pedagang kaki lima, pembantu rumah tangga, pengemis yang pada gilirannya pun akan menimbulkan permasalahan baru di kota. Pekerjaan yang digeluti oleh *unskilled labour* bagaimanapun memiliki

---

<sup>2</sup> Priyono Tjiptoherianjanto, Guru Besar FE – UI, Kompas 8 Mei 2000: urbanisasi adalah persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, penyebab tingginya angka urbanisasi di antaranya adalah pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan, migrasi (dari desa ke kota), perluasan wilayah, perubahan status daerah dari pedesaan ke perkotaan, dan sebagainya.

kompensasi yang relatif lebih tinggi dibanding dengan di desa. Banyak peluang pekerjaan di sektor non-formal terlebih dengan tingkat penghasilan yang relatif tinggi dibandingkan di desa, menjadi daya tarik untuk bermigrasi. Sehingga masalah urbanisasi terus menjadi salah satu agenda besar untuk perkotaan.

Selain permasalahan yang disebabkan oleh urbanisasi, permasalahan perkotaan juga disebabkan oleh kegiatan industri dan kegiatan penduduk di dalam melakukan aktivitas. Dampak dari perindustrian di antaranya adalah polusi. Kegiatan industri merupakan kegiatan pengolahan yang memerlukan sumber daya berupa tenaga kerja, hasil alam, dan teknologi. Selain menghasilkan barang-barang ekonomis, kegiatan industri ini juga menghasilkan buangan dari kegiatan industri. Buangan dari sektor industri ini disebut limbah. Ada sebagian limbah yang dapat didaur ulang di dalam proses produksi tapi sebagian lainnya tidak dapat diolah dan mencemarkan lingkungan. Sebagai contoh adalah penggunaan kendaraan bermotor baik oleh industri untuk mengangkut input bahan baku maupun untuk distribusi output produksinya, maupun yang dilakukan oleh rumah tangga di dalam aktivitas sosial dan ekonominya. Pencemaran terhadap udara yang berasal dari gas karbondioksida yang dihasilkan oleh mesin kendaraan bermotor dirasakan bukan hanya dirasakan oleh industri dan rumah tangga. Udara di perkotaan yang tercemari tersebut juga dihirup oleh semua penduduk yang tinggal di perkotaan baik dia menggunakan kendaraan bermotor ataupun tidak.

## **A. KEMISKINAN**

Salah satu permasalahan kota yang sangat mengkhawatirkan adalah kemiskinan. Banyaknya ukuran mengenai kemiskinan, membuat klasifikasi mengenai tingkat kemiskinan ini menjadi relatif. Ukuran mengenai batas kemiskinan ini disebut dengan garis kemiskinan, yaitu batasan yang menjadi indikator seseorang dikatakan miskin atau tidak. Garis kemiskinan di negara maju berbeda dengan di garis kemiskinan di negara berkembang. Tentu garis kemiskinan di negara maju lebih tinggi dari negara berkembang, hal ini karena tingkat kesejahteraan masyarakat secara agregat lebih tinggi dibanding di negara berkembang. Garis kemiskinan di Indonesia yang secara resmi dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah jumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk makan setara dengan 2100 kalori

per hari/individu dan pemenuhan kebutuhan dasar non-makanan lain seperti perumahan dan pakaian. Garis kemiskinan ini akan berbeda antara kota dan desa. Garis kemiskinan kota tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan desa, karena harga-harga di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Juga, garis kemiskinan akan berubah-ubah sesuai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan dasar tersebut, diartikan bahwa faktor inflasi akan berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya garis kemiskinan.

Penyebab timbulnya kemiskinan di kota disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja yang tersedia dan rendahnya tingkat upah (*Sullivan, Urban Economics*). Kurangnya kesempatan kerja dan rendahnya tingkat upah ini terutama disebabkan adanya perlambatan dari tingkat pertumbuhan ekonomi agregat.

## **B. PERUMAHAN**

Tempat tinggal (perumahan) adalah salah satu kebutuhan dasar dari setiap individu. Masalah perumahan di perkotaan menjadi salah satu masalah yang sangat krusial. Tingginya jumlah penduduk yang berada di perkotaan secara otomatis memberi dampak terhadap permintaan terhadap perumahan.

Permintaan akan perumahan ini ditentukan oleh tingkat pendapatan individu dan biaya untuk membangun atau membeli rumah. Relatif rendahnya tingkat pendapatan di perkotaan dan relatif tingginya biaya untuk membangun atau membeli rumah menjadi kendala bagi orang untuk memiliki tempat tinggal yang layak, padahal rumah adalah salah satu kebutuhan primer. Karenanya, bermunculanlah rumah-rumah liar dengan bangunan yang tidak permanen, yang diiringi dengan ketiadaan akses air bersih, tempat pembuangan, dan sebagainya yang berdampak pada lingkungan yang tidak sehat, ketidakteraturan dan ketidakamanan. Kondisi pemukiman yang seperti ini, merupakan salah satu ciri kemiskinan yang ada di perkotaan.

Di samping itu, pilihan akan lokasi untuk tempat tinggal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti jarak dengan tempat bekerja, jarak dengan penyediaan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah sakit dan lain-lain. Lokasi perumahan dapat dipilih karena lingkungan yang nyaman, udara yang bersih, lokasi yang jauh dari kebisingan (faktor lingkungan), di mana faktor-faktor tersebut akan berhubungan dengan biaya baik biaya untuk pembelian lahan (harga lahan), biaya untuk membangun atau membeli rumah dan biaya transportasi yang diperlukan untuk melakukan



aktivitas keseharian. Oleh karena itu, masalah pemukiman di kota bukan hanya pada masalah perumahan liar atau *slum area* yang biasanya pada titik-titik di pusat perkotaan akan tetapi juga menyangkut penataan fungsi lahan di perkotaan. Pengaturan akan lokasi perumahan ini diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi dari kota tersebut.

### C. KEMACETAN

Kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi memiliki tingkat interaksi yang tinggi antar pelaku ekonominya. Faktor kedekatan dan kemudahan yang merupakan salah satu ciri dari kota memungkinkan interaksi antar pelaku ekonomi tersebut.

Kemacetan timbul karena tingginya rasio antara jumlah kendaraan terhadap panjang jalan. Semakin banyak rumah tangga menggunakan kendaraan pribadi dan makin banyaknya perusahaan menambah jumlah angkutan darat menyebabkan tingkat kemacetan yang semakin tinggi. Setiap kali terjadi kemacetan, muncul kerugian waktu yang diderita oleh rumah tangga dan perusahaan. Sehingga tak jarang rumah tangga dan perusahaan mengalami kerugian waktu dari setiap perjalanan yang ditempuhnya. Kerugian waktu yang diderita oleh rumah tangga dan perusahaan ini merupakan bentuk dari eksternalitas negatif berupa kemacetan. Di mana biaya sosial (*marginal social cost*) yang ditanggung oleh rumah tangga dan perusahaan (sebagai pihak yang menyebabkan sekaligus yang menerima akibat dari kemacetan) lebih tinggi dibandingkan dengan biaya perseorangan (*marginal private cost*). Semakin macet kondisi jalan yang dilalui oleh rumah tangga dan perusahaan, makin tinggi pula *marginal social cost* yang ditanggungnya. Besarnya eksternalitas sangat dipengaruhi oleh tingkat kemacetan, sedangkan tingkat kemacetan tersebut dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang melawati ruas jalan (kepadatan lalu lintas)

Tingkat kemacetan akan berpengaruh terhadap biaya transportasi (baik biaya sosial maupun biaya perorangan) yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga dan perusahaan. Oleh karena itu, kemacetan juga akan mempengaruhi pilihan rumah tangga akan lokasi perumahan dan tempat kerja sebagaimana perusahaan akan menentukan lokasi untuk kegiatan produksi, tempat penjualan dan kantor.

#### D. KRIMINALITAS

Selain berdimensi ekonomi, permasalahan di kota pada akhirnya berdampak pada kerusakan sosial. Sukarnya untuk mendapatkan pekerjaan dan didesak oleh relatif tingginya kebutuhan hidup di kota, menjadi pemicu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Ada bermacam-macam tindak kejahatan baik yang bersifat pelanggaran terhadap hak milik seperti pencurian, pencopetan, penipuan, bersifat pelanggaran terhadap hak pribadi seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan negatif yang bertentangan dengan nilai positif masyarakat seperti, pelacuran, penggunaan obat bius, perjudian dan sebagainya

Selain sebagai akibat, kejahatan ini juga dapat menjadi penyebab ketidakefisienan di dalam kegiatan ekonomi kota. Sebagai contoh munculnya premanisme atau pungutan-pungutan liar yang kerap terjadi di pelabuhan, bukan hanya menimbulkan kerugian secara individu lebih jauh lagi akan berdampak kepada tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (industri). Pungutan-pungutan liar ini pun kerap mengganggu investor asing yang bermaksud menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di perkotaan. Pungutan-pungutan liar yang tidak dapat diprediksi besarnya oleh para investor ini menyebabkan melambungnya biaya produksi. Hal ini menyebabkan para investor enggan menanamkan investasinya. Semakin rendahnya preferensi penanam modal untuk menanamkan modalnya, pada akhirnya menyebabkan melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi khususnya di kota.

Karena dampak yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan sangat luas baik kepada perusahaan maupun rumah tangga, maka tindak kejahatan atau kriminalitas menjadi perlu untuk ditelaah di dalam ekonomi perkotaan. Setidaknya ada tiga alasan mengapa tindak kejahatan atau kriminalitas ini menjadi perlu untuk dibahas (Sullivan, *Urban Economics*):

1. Kejahatan biasanya lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan, dengan tingkat kejahatan tertinggi terletak di pusat kota.
2. Rumah tangga sangat peka (sensitif) terhadap tingkat kejahatan, sehingga keputusan untuk memilih lokasi perumahan sangat dipengaruhi oleh tingkat kriminalitas yang ada. Dengan kata lain tingkat kriminalitas akan berpengaruh pada distribusi ruang dari penduduk di dalam kota dan di antara kota-kota sekitarnya. Karena biasanya orang (rumah tangga) lebih cenderung memilih lokasi perumahan di mana tingkat kejahatannya

tidak tinggi atau relatif aman, biasanya lingkungan yang demikian ini memiliki harga perumahan yang relatif tinggi.

3. Relatif tingginya tingkat kriminalitas di pusat kota menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah-wilayah *suburban* (wilayah satelit/pinggiran kota) karena banyak orang pindah ke wilayah *suburban* ini untuk menghindari kejahatan.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Menurut Anda faktor-faktor apa sajakah yang memicu timbulnya permasalahan-permasalahan yang ada di perkotaan saat ini?
- 2) Bagaimana Anda menjelaskan, pengaruh dari kurangnya kesempatan kerja untuk tenaga kerja terdidik (*skilled labour*) yang tersedia di perkotaan dan relatif rendahnya tingkat pendapatan di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan?
- 3) Jelaskan beberapa permasalahan yang terjadi di perkotaan yang muncul sebagai konsekuensi dari pembangunan yang terjadi di kota!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Untuk menjelaskan faktor-faktor pemicu permasalahan kota, dapat dimulai dengan urbanisasi. Di mana urbanisasi ini akan memberikan dampak baik positif maupun negatif pada kota.
- 2) Sedikitnya peluang kerja di sektor formal tentunya akan menimbulkan pengangguran yang berasal dari sektor ini, di samping tingkat pendapatan yang relatif rendah dibandingkan dengan biaya hidup di kota yang relatif lebih tinggi.
- 3) Beberapa masalah utama yang ada di kota di antaranya adalah kemiskinan perumahan, kemacetan hingga tingginya tingkat kriminalitas.



## RANGKUMAN

---

1. Masalah-masalah yang terjadi di perkotaan sesungguhnya memiliki akar permasalahan yang sama. Diawali dengan adanya arus migrasi ke wilayah perkotaan dan kegiatan industri di perkotaan, selain menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi perkotaan, pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap kota.
2. Kemiskinan merupakan satu persoalan yang sangat serius di perkotaan, karena dari kemiskinan inilah muncul berbagai permasalahan lain di wilayah perkotaan seperti: (1) masalah perumahan yang tidak hanya terbatas pada penataannya tetapi juga munculnya pemukiman liar dan kumuh yang biasanya justru berada di pusat kota, (2) tingginya tingkat kriminalitas yang disebabkan karena banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat terserap di wilayah perkotaan disebabkan tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai di samping pula karena tingginya kompetisi di perkotaan, (3) kemacetan juga merupakan salah satu momok bagi kota-kota besar saat ini, karena semakin tinggi tingkat kemacetan sebuah kota, maka semakin tinggi juga biaya sosial yang harus ditanggung oleh rumah tangga dan perusahaan (industri).



## TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini manakah faktor yang bukan penyebab dari timbulnya berbagai permasalahan di kota?
  - A. *Unskilled labor*.
  - B. *Marginal social cost*.
  - C. Industrialisasi.
  - D. Urbanisasi.
- 2) Apakah yang dimaksud dengan eksternalitas negatif?
  - A. Aktivitas produksi dari perusahaan atau rumah tangga yang mempengaruhi fungsi produksi perusahaan lain atau fungsi konsumsi seseorang tanpa dapat dikoreksi melalui tingkat harga.
  - B. Aktivitas produksi dari perusahaan atau rumah tangga yang memberikan manfaat bagi fungsi produksi perusahaan lain atau fungsi konsumsi seseorang tanpa dapat dikoreksi melalui tingkat harga.

- C. Aktivitas produksi dari perusahaan atau rumah tangga yang menyebabkan kerugian bagi fungsi perusahaan lain atau konsumsi seseorang tanpa dapat dikoreksi melalui tingkat harga.
  - D. Dampak dari kegiatan produksi dari perusahaan atau rumah tangga yang tidak dapat dikoreksi melalui tingkat harga.
- 3) Kemiskinan menjadi masalah yang paling serius di perkotaan. Manakah dari pernyataan berikut ini yang bukan alasan dari pernyataan di atas?
- A. Bahwa kemiskinan dapat menyebabkan timbulnya permasalahan lainnya di perkotaan seperti pemukiman yang padat dan kejahatan.
  - B. Bahwa kemiskinan lebih banyak terjadi di pusat kota ketimbang di wilayah-wilayah sekitarnya.
  - C. Bahwa kemiskinan menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di perkotaan.
  - D. Bahwa kemiskinan terjadi karena terbatasnya peluang kerja di sektor formal.
- 4) Mengapa perumahan yang layak menjadi sangat sukar dimiliki oleh rumah tangga di perkotaan, terutama bagi rumah tangga miskin sehingga menimbulkan *slum area* di pusat kota. Manakah dari pernyataan ini yang bukan faktor utama sulitnya memiliki perumahan yang layak bagi rumah tangga?
- A. Karena rumah tangga mempertimbangkan tingginya biaya transportasi apabila mereka bermukim di area yang jauh dari pusat kota.
  - B. Tersedianya sarana-sarana umum di sekitar lokasi perumahan, seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar.
  - C. Karena biaya untuk membangun atau membeli rumah yang layak relatif sangat tinggi di perkotaan.
  - D. Karena pemilihan akan lokasi perumahan yang relatif aman di mana tingkat kriminalitasnya rendah.
- 5) Kriminalitas yang tinggi di perkotaan dapat menimbulkan dampak yang sangat luas baik untuk perusahaan maupun untuk rumah tangga. Salah satu alasan mengapa masalah kriminalitas menjadi perlu untuk dibahas dalam ekonomi perkotaan adalah ....
- A. tingkat kriminalitas dapat menyebabkan malasnya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab turunnya angka pertumbuhan nasional
  - B. tingkat kriminalitas tidak mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk memilih lokasi perumahan

- C. kemiskinan bukan merupakan masalah yang sangat krusial di perkotaan
- D. tingkat kejahatan tertinggi terletak di wilayah pinggiran kota

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) A
- 2) C
- 3) B
- 4) B
- 5) A

### *Tes Formatif 2*

- 1) A
- 2) B
- 3) A
- 4) B
- 5) C

### *Tes Formatif 3*

- 1) C
- 2) C
- 3) C
- 4) C
- 5) A

## Daftar Pustaka

- Fujita, Masahisa. (1989). *Urban Economic Theory: Land Use and City Size*. Cambridge: University Press.
- Rahardjo, Adisasmita. (2005). *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo, Adisasmita. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Richardson, Harry W. (1978). *Regional and Urban Economis*. England: Great Britain.
- Soesilo, Nining I Ir, MA. (2000). *Ekonomi Kota dan Perkotaan – Buku 1*. Jakarta: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE – UI.
- Sullivan, Arthur O. *Urban Economics, Thrid Edision*. USA: Irwin/McGraw-Hill.